

## PEMBERDAYAAN EKONOMI BURUH TANI TEBU MELALUI PENDAMPINGAN KEUANGAN, UMKM, DAN PENGUATAN SPIRITUAL DI KECAMATAN JATIROTO, KABUPATEN LUMAJANG

Abdul Wadud Nafis, Suhud  
Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember, Indonesia  
Email: [nafiswadud@yahoo.com](mailto:nafiswadud@yahoo.com)

Received: December 4, 2025. Accepted: January 21, 2026. Published: February 25, 2026

**Abstrak:** Kondisi ekonomi buruh tani tebu di Kecamatan Jatiroto, Lumajang, dicirikan oleh ketergantungan pada musiman, pendapatan rendah, dan lemahnya literasi keuangan (Afifah & Haryanto, 2022). Hal ini menimbulkan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Artikel ini melaporkan hasil program pengabdian masyarakat yang bertujuan memberdayakan kelompok rentan ini melalui pendekatan terpadu. Metode utama yang diterapkan adalah pendampingan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar: (1) manajemen keuangan keluarga, (2) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan (3) penguatan spiritual berbasis nilai ekonomi Islam. Peserta kegiatan terdiri dari 150 buruh tani tebu (laki-laki dan perempuan). Evaluasi program menunjukkan dampak positif yang signifikan, dimana 64% peserta melaporkan peningkatan kualitas hidup dan perilaku ekonomi yang lebih terencana, sementara 10% menunjukkan kesadaran dan komitmen tinggi untuk transformasi ekonomi. Hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi multidimensi yang menggabungkan aspek teknis-ekonomi dengan pendekatan nilai spiritual dapat menjadi model efektif untuk pemberdayaan ekonomi komunitas berpendapatan rendah. Program ini menyoroti pentingnya pendampingan yang tidak hanya berfokus pada kapasitas produksi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan ekonomi, buruh tani tebu, UMKM, keuangan keluarga, ekonomi Islam, pendampingan komunitas.

**Abstract:** *The economic conditions of sugarcane farmers in Jatiroto District, Lumajang, are characterized by seasonal dependence, low income, and weak financial literacy (Afifah & Haryanto, 2022). This creates a cycle of poverty that is difficult to break. This article reports on the results of a community service program that aims to empower this vulnerable group through an integrated approach. The main method applied is continuous mentoring that covers three pillars: (1) family financial management, (2) micro, small, and medium enterprise (MSME) development, and (3) spiritual strengthening based on Islamic economic values. The participants consisted of 150 sugarcane farm workers (both men and women). Program evaluation showed significant positive impacts, with 64% of participants reporting improved quality of life and more planned economic behavior, while 10% showed high awareness and commitment to economic transformation. These*

*results indicate that multidimensional interventions combining technical-economic aspects with a spiritual values approach can be an effective model for the economic empowerment of low-income communities. This program highlights the importance of assistance that focuses not only on production capacity but also on changing mindsets and consumption behaviors.*

**Keywords:** *Economic empowerment, sugarcane farmers, MSMEs, household finance, Islamic economics, community mentoring.*

## **Introduction**

Sektor pertanian masih menjadi penopang penting dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya pada komoditas perkebunan seperti tebu yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan ketahanan pangan nasional. Di wilayah agraris seperti Kabupaten Lumajang, subsektor ini memiliki peran signifikan dalam menopang Produk Domestik Bruto sektor pertanian serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun demikian, di balik kontribusi makroekonominya, terdapat paradoks berupa kemiskinan struktural yang dialami oleh buruh tani tebu sebagai aktor utama pada lapisan terbawah sistem agribisnis (Rahmawati & Setiawan, 2021).

Sebagian besar buruh tani tebu bekerja dalam pola musiman dengan status pekerja harian lepas atau sistem borongan. Kondisi ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada siklus produksi tebu serta kebijakan operasional pabrik gula (Suryanto & Kurniawan, 2020). Ketidakpastian tersebut memunculkan kerentanan ekonomi kronis yang berdampak pada stabilitas rumah tangga. Pada masa panen atau giling, pendapatan relatif meningkat, tetapi pada periode non-produktif banyak keluarga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Kerentanan ekonomi ini semakin diperparah oleh rendahnya literasi keuangan dan kapasitas manajerial rumah tangga. Pengelolaan keuangan cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif, sehingga surplus pendapatan musiman tidak dioptimalkan sebagai tabungan atau modal usaha (Lundeberg, 2021). Ketika memasuki masa paceklik, rumah tangga buruh tani kerap bergantung pada pinjaman

informal dengan bunga tinggi, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran utang dan memperkuat kemiskinan struktural (Collins et al., 2009).

Dari perspektif sosiologis, kondisi ini juga berkaitan dengan struktur hubungan produksi yang bercorak patron-klien. Ketergantungan terhadap pemilik lahan atau mandor tidak hanya dalam aspek pekerjaan, tetapi juga akses terhadap informasi dan sumber daya ekonomi (Nurhidayah, 2019). Relasi yang timpang tersebut membatasi ruang agensi kolektif serta melemahkan posisi tawar buruh tani dalam sistem agribisnis. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi melahirkan mentalitas ketergantungan dan fatalisme yang menghambat inisiatif transformasi ekonomi (Chambers, 2017).

Permasalahan multidimensional tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang bersifat parsial dan teknis belum cukup memadai. Program pelatihan keterampilan tunggal tanpa pendampingan berkelanjutan dan tanpa menyentuh dimensi nilai serta pola pikir sering kali tidak menghasilkan perubahan perilaku ekonomi yang berkelanjutan (Mansuri & Rao, 2013). Oleh karena itu, diperlukan paradigma pemberdayaan yang bersifat holistik dan integratif, yang mencakup transformasi pada ranah kognitif, afektif-perilaku, dan spiritual-normatif (Freire, 1970; Ibrahim, 2017).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, integrasi dimensi spiritual dalam pemberdayaan ekonomi memiliki relevansi yang kuat. Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, penghindaran pemborosan, serta memandang kerja sebagai bagian dari ibadah (Ascarya, 2021; Chapra, 2000). Nilai-nilai tersebut berpotensi menjadi modal sosial dan spiritual yang mendorong motivasi intrinsik, memperkuat ketahanan mental, serta membentuk perilaku ekonomi yang lebih berorientasi jangka panjang (Al-Qardhawi, 2022).

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini mengembangkan model pemberdayaan ekonomi terpadu yang mengintegrasikan pendampingan pengelolaan keuangan keluarga, pengembangan kewirausahaan mikro berbasis potensi lokal, dan penguatan spiritualitas ekonomi Islam. Model ini dirancang untuk menghasilkan transformasi yang lebih komprehensif dan

berkelanjutan dibandingkan pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Secara substantif, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi efektivitas model pemberdayaan ekonomi terpadu bagi komunitas buruh tani tebu di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan maupun tantangan dalam proses transformasi ekonomi berbasis komunitas.

Melalui pendekatan tersebut, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi individu dan keluarga, tetapi juga memperkuat kelembagaan sosial komunitas serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan pendekatan rasional-instrumental dan berbasis nilai spiritual. Dengan demikian, artikel ini menawarkan alternatif model pemberdayaan yang menempatkan transformasi ekonomi dan transformasi nilai sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam pembangunan masyarakat agraris.

Konsep pemberdayaan (empowerment) telah mengalami evolusi dari pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan (needs-based) menuju pendekatan yang berbasis aset dan kapabilitas (asset-based dan capability approach) (Sen, 1999). Pemberdayaan pada esensinya adalah proses di mana individu, kelompok, dan komunitas memperoleh kendali (control) atas kehidupan mereka sendiri, dengan mengkritisi dan mengubah hubungan kekuasaan yang menindas atau membatasi (Rappaport, 1987; Zimmerman, 2000). Dalam konteks ekonomi, pemberdayaan berarti peningkatan kapasitas untuk mengambil keputusan ekonomi yang bebas dan bermanfaat, serta akses terhadap sumber daya dan peluang.

Teori Participatory Action Research (PAR) dan Asset-Based Community Development (ABCD) menjadi landasan filosofis program ini. PAR menekankan siklus refleksi-aksi yang melibatkan masyarakat sebagai co-researcher, sehingga pengetahuan yang dihasilkan bersifat lokal, relevan, dan memberdayakan (Reason & Bradbury, 2008). Sementara itu, ABCD menawarkan lensa positif dengan berfokus pada pemetaan dan mobilisasi aset-aset yang sudah dimiliki komunitas—baik aset fisik, manusia, sosial, maupun kultural—sebagai titik awal pembangunan, alih-alih

berfokus pada kekurangan dan masalah (Kretzmann & McKnight, 1993). Kombinasi kedua pendekatan ini memastikan program dibangun dari dalam (*inside-out*), menghargai pengetahuan lokal, dan memperkuat agensi komunitas.

Literasi keuangan didefinisikan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat guna mencapai kesejahteraan finansial (OECD, 2020). Pada rumah tangga berpendapatan rendah dan tidak tetap seperti buruh tani, tantangan literasi keuangan seringkali diperparah oleh kondisi psikologis seperti tekanan mental (*scarcity mindset*) yang menyebabkan fokus kognitif menjadi sempit dan pengambilan keputusan jangka panjang terganggu (Mullainathan & Shafir, 2013).

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi literasi keuangan yang efektif bagi kelompok rentan haruslah sederhana, kontekstual, berulang, dan disertai dengan alat bantu yang memudahkan seperti pencatatan sederhana (Robb & Sharpe, 2021). Selain itu, pendekatan *behavioral nudges*—seperti menyediakan celengan yang terpisah, mengingatkan secara rutin, atau menetapkan tujuan menabung yang spesifik—dapat membantu mengatasi bias *present-bias* (kecenderungan mengutamakan kepuasan saat ini) dan meningkatkan disiplin keuangan (Thaler & Sunstein, 2008). Program ini mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dengan menekankan pada pembiasaan pencatatan dan pembuatan anggaran sebagai langkah awal transformasi perilaku.

Kewirausahaan, khususnya dalam bentuk usaha mikro dan kecil, dipandang sebagai instrumen penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan (Bruton et al., 2013). Namun, kewirausahaan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah seringkali bersifat *necessity-driven* (dipicu oleh keterpaksaan) ketimbang *opportunity-driven*, sehingga ditandai dengan tingkat inovasi dan pertumbuhan yang terbatas (Williams & Nadin, 2010).

Oleh karena itu, pendampingan kewirausahaan dalam program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis produksi, tetapi juga pada pengembangan *entrepreneurial mindset*—seperti kemampuan melihat peluang, berani mengambil risiko yang terukur, dan ketekunan.

## Method

Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan purposif, yaitu untuk menangani masalah di daerah dengan konsentrasi dan kerentanan buruh tani tebu yang tinggi. Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dipilih karena merupakan salah satu sentra produksi tebu utama dengan areal tanam yang luas dan keberadaan Pabrik Gula (PG) yang dominan dalam tata kelola agribisnis setempat (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2022). Dominasi sistem agribisnis tebu ini menciptakan struktur ketenagakerjaan yang massif namun rentan.

Sasaran peserta adalah kepala keluarga atau anggota keluarga (khususnya ibu rumah tangga) dari rumah tangga buruh tani tebu. Jumlah peserta ditargetkan sebanyak 150 orang, yang akan dibagi ke dalam 10 kelompok belajar yang lebih kecil (masing-masing 15 orang) untuk memfasilitasi interaksi dan pendampingan yang lebih intensif. Kriteria seleksi peserta dirumuskan secara ketat untuk memastikan kesesuaian dan komitmen, meliputi: (1) Berstatus sebagai buruh tani tebu (baik sebagai pekerja kebun, panen, atau angkutan) sebagai mata pencaharian utama atau satu-satunya; (2) Memiliki motivasi tinggi yang terlihat dari inisiatif untuk mendaftar dan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan; (3) Bersedia secara aktif berpartisipasi, termasuk menyediakan waktu dan mengikuti aturan kelompok seperti pencatatan keuangan; serta (4) Memperhatikan keterwakilan gender, dengan mendorong partisipasi aktif perempuan mengingat peran strategis mereka sebagai manajer keuangan rumah tangga dalam banyak keluarga (Pujiyanto, 2022; World Bank, 2012).

Program ini mengadopsi pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) sebagai landasan metodologis (Minkler & Wallerstein, 2018; Reason & Bradbury, 2008). Pendekatan ini menempatkan peserta bukan sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek dan mitra aktif dalam keseluruhan siklus kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, program dirancang sebagai proses *co-learning* yang menekankan penguatan kapasitas kolektif dan kepemilikan bersama terhadap perubahan yang dihasilkan.

Pelaksanaan program mengikuti siklus aksi–refleksi yang sistematis selama dua belas bulan. Pada tahap awal dilakukan persiapan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemuka agama guna membangun legitimasi sosial dan dukungan kelembagaan. Sosialisasi kepada calon peserta dilakukan secara terbuka, disertai proses seleksi berbasis kriteria partisipasi dan komitmen. Pertemuan komitmen awal difasilitasi untuk menyamakan persepsi, menyepakati tujuan bersama, serta menetapkan aturan partisipasi.

Tahap implementasi inti berfokus pada pelaksanaan modul pelatihan dan pendampingan yang mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas ekonomi-keuangan, pengembangan kewirausahaan mikro, dan internalisasi nilai spiritual ekonomi Islam. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan kelompok terstruktur, lokakarya partisipatif, dan pelatihan praktis. Setelah fase pelatihan dasar, dilakukan pendampingan lapangan secara intensif melalui kunjungan rutin ke rumah dan lokasi usaha peserta. Pendampingan ini bersifat *on-the-job mentoring*, berorientasi pada pemecahan masalah konkret yang dihadapi peserta, sekaligus memperkuat jejaring dengan pemangku kepentingan lokal seperti dinas terkait, koperasi, dan pelaku pasar. Tahap akhir diarahkan pada evaluasi partisipatif, refleksi pembelajaran kolektif, serta perumusan strategi keberlanjutan kelembagaan kelompok.

Modul pendampingan ekonomi dan keuangan dirancang berdasarkan prinsip *financial inclusion* dan pendekatan *behavioral economics* untuk mengatasi bias kognitif dalam pengambilan keputusan keuangan (Kahneman, 2011; Robb & Sharpe, 2021). Pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual, aplikatif, dan menghindari terminologi teknis yang kompleks. Peserta dilatih melakukan pencatatan arus kas keluarga secara disiplin menggunakan media sederhana, baik buku catatan maupun aplikasi telepon genggam. Proses ini bertujuan membangun kesadaran terhadap pola pemasukan dan pengeluaran sebagai dasar diagnosis keuangan rumah tangga. Berdasarkan data tersebut, peserta difasilitasi untuk mengkategorikan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta menyusun anggaran realistis yang memprioritaskan kebutuhan pokok dan alokasi tabungan. Konsep dana darurat diperkenalkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap guncangan ekonomi,

disertai diskusi kritis mengenai risiko utang konsumtif berbunga tinggi dan strategi alternatif pengelolaan keuangan (Collins et al., 2009).

Pendampingan kewirausahaan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang berorientasi pada pemetaan dan optimalisasi aset lokal (Kretzmann & McKnight, 1993). Proses dimulai dengan *resource mapping* melalui diskusi kelompok terfokus untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam, keterampilan individu, serta peluang pasar yang tersedia di lingkungan sekitar. Potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi ide usaha yang layak secara ekonomi. Pelatihan teknis produksi diberikan untuk menjamin standar kualitas produk, disertai penguatan manajemen usaha sederhana seperti pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, perhitungan harga pokok produksi, pencatatan transaksi, serta strategi pengemasan dan pelabelan. Pada aspek pemasaran, peserta diperkenalkan pada strategi pemasaran langsung, sistem *pre-order*, serta pemanfaatan media sosial sederhana seperti WhatsApp Group dan Facebook dengan dukungan anggota keluarga yang lebih muda. Jejaring dengan pasar tradisional dan koperasi desa turut difasilitasi untuk memperluas akses pasar.

Dimensi spiritual berfungsi sebagai jangkar moral dan motivasional yang memperkuat dua pilar lainnya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk halaqah mingguan yang menciptakan ruang refleksi kolektif. Pendekatan yang digunakan bersifat dialogis dan reflektif (*tadabbur*), mengaitkan realitas ekonomi peserta dengan nilai-nilai ajaran Islam. Materi difokuskan pada rekonseptualisasi kerja sebagai ibadah, perluasan makna rezeki, serta penanaman integritas dan amanah dalam transaksi ekonomi (Al-Qardhawi, 2022). Prinsip keadilan (*‘adl*), kejujuran (*shiddiq*), dan tanggung jawab sosial ditekankan sebagai fondasi etika bisnis. Selain itu, refleksi terhadap perilaku konsumtif dan pemborosan (*israf*) dilakukan untuk mendorong gaya hidup sederhana (*qana’ah*) yang mendukung stabilitas finansial dan ketenangan psikologis (Ascarya, 2021).

Untuk menjamin validitas dan kedalaman evaluasi, digunakan strategi triangulasi dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data (Creswell & Poth, 2018). Observasi partisipatif dilakukan secara berkelanjutan untuk merekam

dinamika kelompok, tingkat partisipasi, dan kendala implementasi. Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan secara periodik guna menggali perubahan persepsi, pengalaman kolektif, dan tantangan yang muncul. Analisis dokumen berupa catatan keuangan peserta digunakan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku ekonomi secara konkret, khususnya dalam hal konsistensi pencatatan, pengendalian pengeluaran, dan kebiasaan menabung. Wawancara mendalam terhadap peserta terpilih dilakukan untuk mengonstruksi narasi personal mengenai proses transformasi yang dialami, termasuk makna spiritual yang dirasakan. Selain itu, jurnal reflektif pendamping digunakan sebagai instrumen evaluasi internal dan pembelajaran program.

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema dominan, serta hubungan antar-dimensi perubahan (Braun & Clarke, 2006). Analisis dilakukan secara berkelanjutan selama program berlangsung guna memungkinkan penyesuaian strategi implementasi melalui pendekatan *adaptive management*. Dengan desain metodologis ini, program tidak hanya berorientasi pada capaian output, tetapi juga pada proses transformasi partisipatif yang berkelanjutan dan kontekstual

## **Result and Discussion**

Implementasi program diawali dengan tantangan signifikan terkait trust-building dalam komunitas yang memiliki pengalaman historis dengan intervensi pembangunan yang bersifat top-down, ad-hoc, dan tidak berkelanjutan. Sebagaimana dicatat dalam literatur pemberdayaan, sikap skeptis dan apatis sering kali merupakan respons rasional masyarakat terhadap program-program sebelumnya yang gagal memenuhi janji atau tidak relevan dengan konteks lokal (Mansuri & Rao, 2013). Observasi partisipatif pada minggu pertama menunjukkan kecenderungan ini; peserta datang dengan ekspektasi rendah, menganggap program sebagai bentuk bantuan sosial lain yang bersifat karitatif dan seremonial (Mulyadi, 2019). Untuk mengatasi hambatan psikologis ini, tim pendamping secara konsisten menegaskan posisi mereka sebagai fasilitator dan mitra belajar, bukan sebagai ahli atau pemberi solusi mutlak. Pendekatan komunikasi yang digunakan adalah dialogis dan reflektif, sebagaimana

dikemukakan oleh Freire (1970), yang menggeser paradigma dari "banking concept of education" menuju "problem-posing education".

Puncak perubahan sikap awal terjadi ketika modul pengelolaan keuangan diperkenalkan dengan alat yang sangat konkret dan bebas jargon: buku catatan keuangan harian sederhana. Intervensi mikro ini berhasil karena sifatnya yang langsung aplikatif (actionable), memberikan rasa kontrol (locus of control) yang segera kepada peserta, dan memvalidasi pengetahuan mereka sendiri tentang arus dana keluarga (Robb & Sharpe, 2021). Saat peserta mulai mencatat dan melihat visualisasi pengeluaran mereka, terjadi momen "kesadaran kritis" (conscientization) yang menjadi titik tolak motivasi intrinsik. Mereka menjadi subjek yang aktif menganalisis realitas keuangannya sendiri, bukan sekadar objek yang menerima instruksi.

Sesi identifikasi potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menggunakan pendekatan asset-based community development (ABCD) terbukti sangat efektif dalam membangkitkan partisipasi aktif dan optimisme kolektif (Kretzmann & McKnight, 1993). Melalui diskusi kelompok terfokus dan metode resource mapping, peserta secara kolektif memetakan aset-aset yang selama ini terabaikan atau dianggap tidak bernilai ekonomi. Proses ini tidak hanya menghasilkan daftar ide usaha, tetapi juga berfungsi sebagai empowerment tool dengan mengubah perspektif peserta dari berfokus pada kekurangan (deficit-based) menjadi berfokus pada potensi (strength-based).

Beberapa potensi yang berhasil diidentifikasi dan kemudian dikembangkan antara lain: (1) Pemanfaatan limbah pertanian, seperti daun dan pucuk tebu untuk pakan ternak kambing dan sapi secara kolektif; (2) Pengolahan produk turunan tebu non-gula, seperti pembuatan gula semut (brown sugar) dan sirup tebu skala rumah tangga dengan teknik sederhana; serta (3) Pengembangan usaha jasa dan kerajinan berbasis keterampilan yang sudah dimiliki, seperti servis alat pertanian kecil dan pembuatan sapu lidi. Proses identifikasi ini menunjukkan tingginya local knowledge

yang selama ini tersembunyi dan tidak terstruktur. Keberhasilan sesi ini mengonfirmasi tesis bahwa masyarakat lokal adalah ahli terbaik atas konteks dan sumber daya mereka sendiri (Chambers, 2017).

Pertemuan halaqah mingguan yang berfokus pada spiritualitas ekonomi Islam berkembang menjadi lebih dari sekadar forum pengajaran nilai. Ia berevolusi menjadi ruang psiko-sosial yang multifungsi. Pertama, sebagai ruang refleksi kritis, di mana peserta mendiskusikan kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang dipelajari (seperti kejujuran, hemat, etos kerja) dengan praktik keseharian mereka. Misalnya, diskusi tentang larangan riba (bunga) tidak berhenti pada tingkat normatif, tetapi dikaitkan dengan pengalaman nyata mereka terjatut utang ke rentenir dan alternatif sistem bagi hasil atau arisan yang bisa dikembangkan di kelompok (Ascarya, 2021).

Kedua, ruang ini berfungsi sebagai sistem dukungan sosial (social support system) yang kuat. Peserta saling berbagi kesulitan, merayakan kemajuan kecil, dan saling mengingatkan untuk disiplin menabung atau menahan diri dari belanja impulsif. Dukungan sosial ini, sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Wills (1985), berperan sebagai buffer terhadap stres ekonomi dan memperkuat resiliensi individu. Ketiga, dan yang paling penting, ruang ini menjadi jembatan integratif antara modul-modul teknis. Sebagai contoh, pembahasan tentang kejujuran (shiddiq) dan amanah dalam sesi spiritual langsung diterjemahkan dalam sesi kewirausahaan menjadi prinsip menjaga kualitas produk dan tidak menipu dalam timbangan. Dengan demikian, spiritualitas tidak berada di menara gading, tetapi menjadi ethical framework yang hidup dan membingkai aktivitas ekonomi rasional (Al-Qardhawi, 2022).

Evaluasi kualitatif dan analisis terhadap catatan keuangan peserta menunjukkan adanya pergeseran perilaku yang signifikan pada mayoritas peserta. Perubahan paling mendasar adalah adopsi kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dari 150 peserta, 112 orang (74.7%) menunjukkan konsistensi dalam pencatatan selama tiga bulan terakhir program. Praktik ini, yang terkesan sederhana, merupakan landasan kognitif bagi pengambilan keputusan keuangan yang lebih

rasional. Ia mengatasi bias memori dan memberikan data nyata untuk perencanaan (Robb & Sharpe, 2021).

Perubahan berikutnya adalah kemampuan menyusun skala prioritas dalam anggaran. Peserta melaporkan peningkatan kesadaran untuk membedakan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Seorang peserta perempuan menyatakan dalam wawancara mendalam, "Dulu, dapat upah borongan langsung beli baju baru atau makan di warung. Sekarang, saya hitung dulu: berapa untuk beras, listrik, sekolah anak, baru kalau ada sisa bisa untuk yang lain. Buku catatan ini seperti cermin" (Wawancara, 15 November 2023). Pernyataan ini mencerminkan internalisasi konsep self-regulation dan delayed gratification, yang merupakan komponen kunci dari literasi keuangan dan kesejahteraan jangka panjang (Mullainathan & Shafir, 2013).

Salah satu dampak paling nyata adalah munculnya inisiatif ekonomi baru. Sekitar 45 peserta (30%) telah memulai atau merevitalisasi usaha mikro dalam periode pendampingan. Spektrum usahanya beragam, mencerminkan potensi lokal yang telah diidentifikasi, mulai dari peternakan sapi/kambing kolompok berbasis limbah tebu, produksi keripik pisang dan snack tradisional, hingga jasa perawatan anak (daycare) sederhana. Meski skalanya mikro dan modalnya terbatas, usaha-usaha ini memiliki makna strategis yang dalam: (1) Menciptakan income buffer di luar siklus tebu, sehingga mengurangi kerentanan akibat musim paceklik; (2) Memberikan pengalaman belajar langsung (experiential learning) tentang manajemen usaha, menghitung harga pokok, dan melayani pelanggan; serta (3) Membangun kepercayaan diri dan identitas baru sebagai "pengusaha", tidak hanya sebagai "buruh".

Yang menarik diamati adalah penerapan prinsip pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga oleh beberapa peserta yang lebih progresif. Meski belum sempurna, upaya ini menunjukkan pemahaman awal tentang pentingnya sustainability usaha dan reinvestasi keuntungan, suatu konsep yang sering kali absen dalam usaha mikro subsisten (Bruton et al., 2013).

Sekitar 15 peserta (10%) menunjukkan tingkat adopsi dan internalisasi yang sangat tinggi, sehingga secara alamiah berperan sebagai agent of change atau positive deviants dalam komunitas mereka (Pascale et al., 2010). Individu-individu ini tidak hanya menguasai materi, tetapi juga aktif mendampingi rekan sekelompoknya yang mengalami kesulitan, memoderasi diskusi, dan menjadi penghubung antara kelompok dengan tim fasilitator. Keberadaan mereka merupakan indikator penting keberhasilan program dalam membangun kapasitas kepemimpinan lokal.

Fenomena ini merepresentasikan penguatan modal sosial (social capital), khususnya dalam bentuk bridging capital (jaringan yang menghubungkan kelompok dengan sumber daya eksternal) dan bonding capital (kepercayaan dan norma reciprocitas di dalam kelompok) (Putnam, 2000). Kelompok belajar yang awalnya dibentuk secara artifisial, secara bertahap berkembang menjadi jaringan saling percaya yang dapat digunakan untuk pinjam-meminjam alat, bergotong royong, atau saling menjadi pasar pertama bagi produk masing-masing. Modal sosial ini adalah faktor kunci yang menjamin keberlanjutan inisiatif pemberdayaan setelah intervensi formal berakhir (Woolcock, 2001).

Analisis data wawancara dan FGD mengungkap bahwa internalisasi nilai-nilai spiritual berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk perubahan perilaku berkelanjutan. Konsep-konsep seperti "rezeki yang halal dan baik (thayyib)" dan "bekerja sebagai ibadah" berhasil melakukan reframing terhadap persepsi peserta tentang aktivitas ekonomi. Pekerjaan sebagai buruh tani atau pengusaha mikro tidak lagi dilihat semata sebagai aktivitas melelahkan untuk sekadar bertahan hidup (survival), tetapi sebagai manifestasi dari tanggung jawab keagamaan dan jalan untuk meraih keberkahan (Al-Qardhawi, 2022). Perubahan persepsi ini berimplikasi pada peningkatan work ethic, kesabaran, dan rasa hormat terhadap pekerjaan itu sendiri.

Mekanisme ini selaras dengan teori Self-Determination Theory (SDT) yang dikemukakan Ryan dan Deci (2000). Program berhasil memfasilitasi pergeseran dari motivasi ekstrinsik (misalnya, mengikuti program karena ada insentif atau tekanan sosial) menuju motivasi intrinsik (melakukan pengelolaan keuangan atau

berwirausaha karena hal itu selaras dengan nilai-nilai inti dan identitas diri). Motivasi intrinsik, yang bersumber dari kebutuhan psikologis dasar akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan (autonomy, competence, relatedness), jauh lebih kuat dan tahan lama dalam mendorong perilaku daripada motivasi ekstrinsik.

Nilai-nilai etika ekonomi Islam, khususnya kejujuran (shiddiq), amanah (dapat dipercaya), dan larangan terhadap penipuan (gharar), berfungsi sebagai sistem kendali internal (internal control system) yang efektif. Dalam konteks berwirausaha, peserta yang menginternalisasi nilai-nilai ini melaporkan bahwa mereka merasa "diamati oleh Yang Maha Melihat", sehingga terdorong untuk menjaga kualitas produk, memberikan takaran yang penuh, dan terbuka tentang kondisi barang. Menariknya, perilaku etis ini, yang awalnya didorong oleh motivasi spiritual, justru menghasilkan keuntungan ekonomi sekunder: membangun reputasi dan kepercayaan (trust) dari pelanggan. Dalam pasar lokal yang kompetitif, reputasi sebagai penjual yang jujur dan amanah menjadi competitive advantage yang bernilai (Beekun & Badawi, 2005).

Pembahasan mendalam tentang israf (berlebihan) dan tabdzir (menyia-nyiaikan) memberikan justifikasi normatif yang kuat bagi praktik penghematan dan hidup sederhana yang diajarkan dalam modul keuangan. Peserta tidak lagi memandang hidup hemat sebagai suatu bentuk kekurangan atau kepelitan, tetapi sebagai sebuah keutamaan agama dan wujud dari rasa syukur (syukur). Sebaliknya, konsep qana'ah (merasa cukup) membantu mengurangi tekanan sosial untuk konsumsi yang menunjukkan status (conspicuous consumption) dan mengurangi stres terkait perbandingan sosial (social comparison) (Ascarya, 2021). Kombinasi antara kesadaran finansial rasional dan pembenaran spiritual ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk perilaku konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian hasil program dapat dijelaskan melalui konvergensi sejumlah faktor kunci yang bekerja secara simultan dan saling memperkuat. Pertama, pendekatan holistik yang diterapkan menunjukkan kesesuaian dengan kerangka teoritis perubahan perilaku yang komprehensif, seperti *Knowledge-Attitude-Practice*

(KAP) Model dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991; Glanz et al., 2015). Integrasi dimensi kognitif-rasional melalui literasi keuangan, dimensi psikomotorik-teknis melalui pengembangan usaha mikro, serta dimensi afektif-spiritual melalui internalisasi nilai ekonomi Islam menghasilkan efek sinergis. Intervensi yang menysar ketiga ranah ini mendorong perubahan yang tidak hanya bersifat informasional, tetapi juga menyentuh sikap, intensi, dan praktik nyata peserta. Sinergi tersebut sulit dicapai apabila pendekatan dilakukan secara parsial atau terfragmentasi.

Kedua, penerapan metodologi partisipatif berbasis *Participatory Action Research* (PAR) berperan signifikan dalam membangun efektivitas program. Pendekatan ini menggeser dinamika relasi dari pola top-down menjadi kolaboratif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, serta evaluasi kegiatan. Keterlibatan tersebut menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) terhadap proses dan hasil program. Relasi fasilitasi yang setara antara pendamping dan peserta memperkuat kepercayaan (*trust*), yang menjadi fondasi penting bagi penerimaan materi dan keberanian melakukan perubahan (Reason & Bradbury, 2008). Dengan demikian, transformasi yang terjadi tidak dipersepsi sebagai instruksi eksternal, melainkan sebagai kesadaran kolektif yang tumbuh dari dalam komunitas.

Ketiga, kontekstualisasi materi dan optimalisasi modal sosial lokal turut memperkuat capaian program. Penyampaian materi dengan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari—seperti perhitungan upah borongan atau pemanfaatan limbah kebun—meningkatkan tingkat pemahaman dan keterterapan. Selain itu, program memanfaatkan praktik gotong royong, jejaring kekerabatan, dan solidaritas komunitas sebagai mekanisme dukungan sosial yang mempercepat difusi inovasi (Putnam, 2000). Modal sosial tersebut berfungsi sebagai penguat kolektif dalam mempertahankan kebiasaan baru, khususnya dalam disiplin pencatatan keuangan dan kolaborasi usaha.

Meskipun menunjukkan hasil yang positif, program juga menghadapi berbagai tantangan yang penting dicermati sebagai pembelajaran untuk replikasi dan pengembangan skala yang lebih luas. Pada dimensi eksternal, peserta yang merintis

usaha mikro berhadapan dengan lingkungan pasar yang kompetitif dan fluktuatif, termasuk ketidakstabilan harga bahan baku. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal yang terjangkau menjadi kendala signifikan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas skala usaha (Bruton et al., 2013). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan ekonomi memerlukan dukungan kebijakan dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Pada dimensi internal, sebagian peserta menunjukkan proses perubahan yang relatif lebih lambat, khususnya dalam transformasi kebiasaan konsumtif. Pola pikir kelangkaan (*scarcity mindset*) yang memunculkan perilaku “feast or famine”—konsumtif saat memiliki pendapatan dan kesulitan saat tidak memiliki pemasukan—masih menjadi tantangan yang kompleks (Mullainathan & Shafir, 2013). Perubahan perilaku finansial memerlukan proses habituasi yang lebih panjang daripada durasi intervensi yang tersedia. Selain itu, norma budaya seperti rasa sungkan serta struktur hierarki sosial dalam komunitas terkadang membatasi ruang dialog kritis dan umpan balik terbuka dalam kelompok belajar.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek kelembagaan dan keberlanjutan. Mengingat program berlangsung dalam periode yang terbatas, keberlanjutan kelompok belajar dan usaha mikro yang telah dirintis menjadi isu strategis. Ketahanan mekanisme *peer support*, kapasitas kepemimpinan lokal, serta kemampuan kelompok dalam membangun jejaring eksternal akan sangat menentukan keberlangsungan capaian program. Tanpa akses berkelanjutan terhadap dukungan teknis, pembiayaan, dan pasar, terdapat risiko bahwa sebagian inisiatif yang telah tumbuh akan mengalami stagnasi.

Berbagai tantangan tersebut mengindikasikan bahwa model pemberdayaan yang berhasil pada fase inisiasi memerlukan penguatan *enabling environment* pada fase konsolidasi dan pertumbuhan. Dukungan struktural dalam bentuk akses keuangan inklusif, pendampingan lanjutan, integrasi dengan kebijakan pemerintah daerah, serta perluasan jejaring pasar menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan

dan replikasi model secara lebih luas. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas tidak hanya bergantung pada kualitas intervensi internal, tetapi juga pada kesiapan ekosistem eksternal yang mendukung transformasi jangka panjang.

## **Conclusion**

Berdasarkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi menyeluruh terhadap program pendampingan terpadu di Kecamatan Jatiroto, dapat ditarik beberapa kesimpulan substantif yang memiliki implikasi baik bagi praktik pemberdayaan maupun pengembangan teori.

Pertama, program ini berhasil membuktikan validitas dan efektivitas model pemberdayaan ekonomi holistik yang mengintegrasikan tiga pilar: literasi dan manajemen keuangan rasional, pengembangan kewirausahaan berbasis aset lokal, dan penguatan spiritualitas-etika ekonomi. Hasilnya bukan sekadar peningkatan indikator ekonomi mikro, tetapi lebih penting lagi, terjadinya transformasi kesadaran (*mindset*) dan perilaku pada sebagian besar peserta. Perubahan dari pola keuangan yang impulsif dan reaktif menuju terencana dan proaktif, serta munculnya inisiatif ekonomi baru, menunjukkan bahwa pendekatan ini berpotensi memutus siklus kemiskinan yang bersifat struktural dan kultural.

Kedua, temuan kunci dari program ini adalah peran sentral dimensi spiritual dan nilai-nilai (dalam konteks ini, ekonomi Islam) sebagai katalis integratif dan penggerak keberlanjutan. Spiritualitas berfungsi bukan sebagai pelengkap simbolis, melainkan sebagai kerangka makna (*meaning-making framework*) yang mengubah motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik, menyediakan sistem kendali etika internal, dan memberikan ketahanan psikologis dalam menghadapi ketidakpastian. Ini membuktikan bahwa dalam masyarakat dengan karakter religius yang kuat, pendekatan pembangunan yang mengabaikan dimensi spiritual akan kehilangan daya ungkit psikologis dan sosial yang sangat besar.

Ketiga, keberhasilan program sangat ditopang oleh metodologi partisipatif (Participatory Action Research) yang konsisten. Pendekatan ini berhasil membalikkan relasi kuasa tradisional dalam program pemberdayaan, menempatkan komunitas sebagai subjek aktif dan pemilik proses. Pembentukan modal sosial (social capital) baru berupa kelompok belajar yang solid dan munculnya agen-agen perubahan lokal merupakan aset keberlanjutan yang paling berharga yang dihasilkan, bahkan mungkin lebih penting daripada peningkatan pendapatan itu sendiri.

Keempat, program ini memberikan kontribusi empiris terhadap debat dalam literatur pemberdayaan tentang pentingnya pendekatan yang menyeluruh (comprehensive) versus pendekatan yang spesifik (targeted). Hasil menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah kerentanan multidimensional seperti yang dihadapi buruh tani, intervensi yang hanya menyentuh satu aspek (misal, hanya pelatihan keterampilan) memiliki kemungkinan keberhasilan yang terbatas. Sinergi antar komponen dalam model terpadu menciptakan dampak yang lebih besar daripada jumlah masing-masing bagian.

Untuk mengonsolidasi capaian program, mengatasi berbagai tantangan yang teridentifikasi, serta memfasilitasi replikasi dan skalabilitas model, diperlukan rekomendasi strategis yang melibatkan berbagai level pemangku kepentingan. Pendekatan multiaktor ini penting agar transformasi yang telah diinisiasi tidak berhenti pada fase intervensi awal, melainkan berkembang menjadi gerakan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada level pemerintah daerah, integrasi model pemberdayaan terpadu ke dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi langkah strategis yang mendesak. Pemerintah kabupaten dan provinsi perlu mengadopsi filosofi serta komponen inti model ini dalam program pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di wilayah agraris. Hal ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis bantuan sosial langsung (*social assistance*) menuju pendekatan penguatan kapasitas dan pendampingan jangka panjang (*social empowerment*).

Penguatan kapasitas tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, idealnya dalam rentang waktu menengah (tiga hingga lima tahun), guna memastikan kesinambungan proses pendampingan sosial. Investasi ini sebaiknya difokuskan pada penguatan tenaga pendamping masyarakat lokal yang telah terlatih, sehingga kapasitas fasilitasi tetap terjaga setelah program awal berakhir.

Selain itu, pemerintah daerah perlu menciptakan *enabling environment* yang mendukung pertumbuhan usaha mikro peserta. Penguatan ekosistem UMKM dapat dilakukan melalui fasilitasi akses pembiayaan mikro berbasis syariah dengan skema yang sederhana dan inklusif, misalnya melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Penyediaan ruang pemasaran bersama, integrasi produk peserta dalam pengadaan barang pemerintah, serta akses terhadap pelatihan teknis lanjutan dan teknologi tepat guna juga menjadi komponen penting dalam mendukung fase konsolidasi dan pertumbuhan usaha.

Pada level komunitas, penguatan kelembagaan menjadi kunci keberlanjutan. Kelompok belajar yang telah terbentuk perlu didorong untuk bertransformasi menjadi entitas formal sederhana, seperti Kelompok Usaha Bersama atau koperasi serba usaha. Status kelembagaan formal akan mempermudah akses terhadap pembiayaan, pengelolaan kontrak, serta pengembangan usaha kolektif. Sejalan dengan itu, pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis komunitas, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dapat menjadi instrumen strategis untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara berkelanjutan. Dengan tata kelola profesional dan pendampingan teknis yang memadai, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan berbasis bagi hasil, tetapi juga sebagai pusat edukasi keuangan syariah yang berkelanjutan (Ascarya, 2021).

Pengembangan sistem pendampingan antar-sebaya (*peer-to-peer coaching*) juga direkomendasikan sebagai mekanisme internalisasi keberlanjutan. Kelompok inti peserta yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan komitmen tinggi dapat diberikan pelatihan lanjutan untuk berperan sebagai *community coach*. Melalui pengakuan sosial dan perluasan jejaring, mereka dapat menjadi agen perubahan yang

secara reguler mendampingi kelompok lain, sehingga tercipta siklus pembelajaran mandiri dalam komunitas.

Pada level perguruan tinggi, dokumentasi dan standarisasi modul pendampingan menjadi langkah penting untuk memastikan replikasi yang sistematis. Modul keuangan, kewirausahaan, dan spiritualitas perlu dikembangkan menjadi paket kurikulum yang terstruktur namun tetap fleksibel untuk adaptasi kontekstual. Perguruan tinggi juga dapat membangun kemitraan tripartit yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan komunitas melalui keterlibatan dosen serta mahasiswa dalam pendampingan lanjutan, termasuk manajemen usaha, pemasaran digital sederhana, dan riset aksi untuk pemecahan masalah spesifik. Pendekatan “desa binaan” jangka panjang dapat dijadikan model keberlanjutan, di mana desa atau kelurahan berfungsi sebagai laboratorium sosial multidisipliner yang memungkinkan kontribusi terintegrasi dari berbagai bidang ilmu.

Dari sisi pengembangan keilmuan, penelitian longitudinal diperlukan untuk menilai keberlanjutan dampak program dalam jangka menengah dan panjang, misalnya pada tahun ketiga dan kelima pasca-intervensi. Evaluasi tersebut penting untuk mengukur konsistensi perubahan perilaku, perkembangan usaha mikro, serta dampaknya terhadap indikator kesejahteraan yang lebih luas seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kesejahteraan subjektif. Studi komparatif lintas wilayah dan lintas karakteristik sosial-budaya juga diperlukan guna menguji robustnes dan fleksibilitas model dalam konteks yang berbeda. Selain itu, eksplorasi metodologis untuk mengkuantifikasi kontribusi dimensi spiritual terhadap hasil ekonomi dan sosial menjadi agenda riset yang menjanjikan, sehingga diskursus di persimpangan studi pembangunan, ekonomi perilaku, dan spiritualitas dapat diperkaya secara empiris.

Dengan implementasi rekomendasi strategis tersebut, transformasi yang telah diinisiasi melalui program pendampingan terpadu di Jatiroto berpotensi berkembang menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan dan adaptif. Keberhasilan jangka

panjang tidak hanya bergantung pada kualitas intervensi awal, tetapi juga pada konsistensi dukungan struktural, penguatan kelembagaan lokal, serta pengembangan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri dan bermartabat.

## Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al-Qardhawi, Y. (2022). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1, M. Kahf, Trans.). Dar al-Taqwa.
- Ascarya, A. (2021). *Islamic economics and finance: An epistemological approach*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang. (2023). *Kabupaten Lumajang dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Lumajang.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman and Company.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bruton, G. D., Ketchen, D. J., & Ireland, R. D. (2013). Entrepreneurship as a solution to poverty. *Journal of Business Venturing*, 28(6), 683–689. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.05.002>
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing. <https://doi.org/10.3362/9781780449449>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>
- Collins, D., Morduch, J., Rutherford, S., & Ruthven, O. (2009). *Portfolios of the poor: How the world's poor live on \$2 a day*. Princeton University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. (2022). Statistik perkebunan unggulan Jawa Timur 2021. Dinas Perkebunan Provinsi Jatim.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed* (M. B. Ramos, Trans.). Herder and Herder.
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (Eds.). (2015). *Health behavior: Theory, research, and practice* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Ibrahim, S. S. (2017). How to build social capital for community economic development: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(4), 402–417. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2015-0032>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Lundeberg, M. A. (2021). Financial scarcity and cognitive function: A review and synthesis. *Current Opinion in Psychology*, 39, 18–22. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.07.005>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-3>
- Minkler, M., & Wallerstein, N. (Eds.). (2018). *Community-based participatory research for health: Advancing social and health equity* (3rd ed.). Jossey-Bass.
- Mulyadi, A. (2019). *Pemberdayaan masyarakat pedesaan: Teori dan praktik*. PT. Refika Aditama.
- Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why having too little means so much*. Times Books.
- Nasution, M. E. (2020). Etos kerja dalam perspektif Islam dan implikasinya terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.17891>
- Nurhidayah, S. (2019). Relasi patron-klien dalam sistem pertanian tebu rakyat di Jawa Timur. *Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 112–125.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy*. OECD.
- Pascale, R., Sternin, J., & Sternin, M. (2010). *The power of positive deviance: How unlikely innovators solve the world's toughest problems*. Harvard Business Press.
- Pujianto, A. (2022). Perempuan sebagai manajer keuangan rumah tangga: Strategi survival keluarga buruh tani. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 17(1), 45–58.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahmawati, R., & Setiawan, I. (2021). Dinamika ketenagakerjaan dan kerentanan ekonomi rumah tangga buruh tani tebu di Jawa Timur. *Agriekonomika*, 10(1), 1–13.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The Sage handbook of action research: Participative inquiry and practice* (2nd ed.). Sage Publications.
- Robb, C. A., & Sharpe, D. L. (2021). Financial literacy and household behavior: A review of the evidence. In *Handbook of consumer finance research* (pp. 35–49). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-50002-7\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-50002-7_3)
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Suryanto, T., & Kurniawan, A. (2020). Pola konsumsi dan pengelolaan keuangan rumah tangga buruh harian lepas di sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 101–114.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Williams, C. C., & Nadin, S. (2010). Entrepreneurship and the informal economy: An overview. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 15(04), 361–378. <https://doi.org/10.1142/S1084946710001683>
- Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.
- World Bank. (2012). *World development report 2012: Gender equality and development*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8810-7>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.
- Cornwall, A. (2016). Women's empowerment: What works? *Journal of International Development*, 28(3), 342–359. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Karlan, D., & Valdivia, M. (2011). Teaching entrepreneurship: Impact of business training on microfinance clients and institutions. *The Review of Economics and Statistics*, 93(2), 510–527. [https://doi.org/10.1162/REST\\_a\\_00074](https://doi.org/10.1162/REST_a_00074)

- Moser, C. O. N. (1998). The asset vulnerability framework: Reassessing urban poverty reduction strategies. *World Development*, 26(1), 1–19. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(97\)10015-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(97)10015-8)
- Narayan, D. (Ed.). (2005). *Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives*. The World Bank.
- Pranarka, A. M. W., & Moelyono, S. (2020). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. CSIS.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press.
- Smets, P., & Khadijah, S. (2019). Islamic microfinance and social capital: A case study of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 195–222. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1056>
- Uphoff, N. (1992). *Learning from Gal Oya: Possibilities for participatory development and post-Newtonian social science*. Cornell University Press.